

BAB III

MASALAH PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

DI PALESTINA 2014 - 2016

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang konflik Israel - Palestina serta masalah yang dihadapi Palestina. Penjelasan tersebut akan dimulai dengan sejarah konflik Isarel - Palestina dengan diawali gambaran umum secara singkat tentang masing-masing negara, kemudian menjelaskan masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina.

A. Sejarah Konflik Israel – Palestina

Dalam sejarah, nama Bani Israel tidak hanya dikenal dengan sebutan Israel saja tapi juga dikenal dengan sebutan Ibrani dan Yahudi. Sebutan yang biasa kita kenal dengan nama Israel atau Bani Israel (*Isariliyin*) merupakan sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak keyakinan mereka yakni Ya'qub ibn Ishaqi ibn Ibrahim as. Nama Israel terdiri dari dua kata yang masing-masing mengandung arti yakni, *Isra* yang berarti hamba atau teman dekat dan *el* yang berarti Tuhan. Dengan demikian Israel memiliki arti sebagai Hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan (Agha, 2005).

Berdirinya Israel berawal pada zaman klasik yakni pada tahun 1025 SM, yang saat itu pertama kali digagas dan dikembangkan oleh Syaul di dalam Al-Quran disebut dengan Thalut, beliau menjadi pemimpin Israel yang bersuku-suku. Para ahli

mengelompokkan Yahudi kedalam tiga kelompok besar, yaitu Ashkenazim, Sefardim, dan Syarqiyin (Agha, 2005).

Kelompok pertama, Ashkenazim merupakan kelompok yahudi yang juga disebut sebagai Yahudi Khazar dan dinisbatkan kepada Yahudi Jerman atau Yahudi keturunan Jerman. Pada umumnya mereka hidup di negara-negara dengan bahasa Jerman sebagai bahasa utama. Kelompok ini hidup dan berkembang pada abad pertengahan khususnya sejak abad 13 M. Namun, seiring berkembangnya zaman mereka mengalami penyebaran ke beberapa negara bagian Timur dan Barat. Mereka yang pada awalnya menggunakan bahasa Jerman dengan menyisipkan beberapa kosa kata bahasa Ibrani dan bahasa asing lainnya kemudian menetapkan dan melestarikan bahasa mereka yang dinamakan dengan bahasa Viadish dan menetap di Inggris, utara Prancis, serta sebagian wilayah Austria yang dihuni suku-suku Slavik.

Kelompok kedua, Sefardim merupakan kelompok Yahudi yang berpindah setelah wilayah Semenanjung Iberia – Spanyol ditaklukkan oleh kaum Muslim sejak tahun 711 M. Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Spanyol. Pada masa pemerintahan Muslim saat itu, bangsa Yahudi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun, setelah pemerintahan Islam runtuh, dan digantikan oleh pemerintahan Nasrani Katolik bangsa Yahudi mengalami desakan dan tekanan dari pemerintahan Nasrani. Sehingga, tidak sedikit bangsa Yahudi yang kemudian berpura-pura beralih keyakinan dengan memeluk Kristen atau Nasrani Marony pada khususnya namun tetap menjalankan ritual keagamaan Yahudi secara diam-diam dan

bersembunyi. Beberapa orang Yahudi lainnya memilih untuk keluar dari wilayah tersebut dan bermigrasi ke wilayah Utara Eropa khususnya Jerman. Akhirnya kelompok Yahudi Sefardim bergabung dan tinggal berdampingan dengan kelompok Yahudi Ashkenazim di Jerman. Meskipun pada awalnya mereka sempat bersitegang karena masing-masing kelompok mengklaim dirinya merupakan kelompok Yahudi yang paling mulia. Namun, karena mereka memiliki kondisi yang sama yakni berada dalam tekanan Eropa khususnya pemeluk agama Nasrani pada saat itu, akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu dalam rangka melawan dan menghadapi tekanan yang datang pada abad 16 – 18 M.

Kelompok ketiga, Syarqiyin merupakan kelompok Yahudi yang terusir dan meninggalkan wilayah Palestina yang kemudian melakukan diaspora ke wilayah Afghanistan, Iran, Irak, Delta Mesir Barat, dan Utara Afrika (Maroko dan sekitarnya). Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan merupakan bahasa setempat dimana mereka berdomisili dan masih tetap mempertahankan bahasa tradisonal mereka. Namun, pada pertengahan abad ke 20 mereka berbondong-bondong kembali ke tanah Palestina terutama dalam peperangan Islam Yahudi pada tahun 1960-an. Setelah kembali ke tanah Palestina kelompok Yahudi tersebut menyebut diri mereka sebagai kelompok Yahudi Separdim.

Dalam perkembangan sejarahnya, istilah kelompok Yahudi Ashkenazim merupakan Yahudi Barat dari Eropa dan Amerika yang berpindah ke Palestina. Kelompok inilah yang menduduki posisi-posisi strategis dalam menentukan

kebijakan politik, ekonomi, sosial dan administratif di pemerintahan Israel. Mereka merupakan pemegang pimpinan di Israel dan sekaligus ekstremis Zionisme internasional yang memiliki sarana jaringan informasi dan teknologi yang mampu merombak tatanan informasi dan teknologi dunia. Sedangkan istilah kelompok Yahudi Sefardim merupakan kelompok Yahudi timur yang berada di kelas bawah dan berada satu tingkat di atas kelompok Yahudi yang keturunan Arab dan kelompok Yahudi Timur-Sefardim sedangkan Yahudi Sudan-Ethiopia berada pada lapis terbawah (kelas lima). Kelompok Yahudi kelas bawah tersebut sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan sering mengalami pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh kelompok Yahudi kelas atas yakni kelompok Ashkenazim. Begitu juga dengan kelompok Yahudi yang berpindah dari Irak dan Mesir mereka tidak luput dari perlakuan diskriminatif kelompok atas (Shibel, 1970).

Konflik antara Israel dan Palestina dilatarbelakangi oleh klaim dari masing-masing negara atas wilayah yang sama yakni Palestina. Kata Palestina berasal dari bangsa Philistines yaitu masyarakat asli yang menetap disekitar pantai Palestina bersamaan dengan Yahudi yang pada saat itu menguasai bukit-bukit di bagian dalam wilayah tersebut. Namun, ketika bangsa asing datang dan melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina, Yahudi diusir dari wilayah tersebut. Tepatnya pada tahun 700 M, wilayah tersebut berhasil dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain secara berturut-turut yakni Assyria (Kriesberg, May 2001), Babylon (kerajaan Babylon merupakan kerajaan yang mewarisi kerajaan Assyria), dan Romawi. Setelah berhasil dikuasai

oleh Romawi, mulailah dilakukan penaklukan atas dasar penyebaran agama di Palestina. Pada saat itu agama yang pertama kali menguasai wilayah Palestina ialah agama Islam yang dibawa oleh pasukan gurun. Pasukan gurun menganggap bahwa Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina pada saat itu merupakan tanah yang sakral, karena disanalah Nabi terakhir umat Islam berada. Kemudian agama Kristen berhasil masuk ke Palestina dengan dibawa oleh Crusader. Sama halnya seperti pasukan gurun, Crusader menganggap bahwa Yerusalem merupakan Tanah Sakral sebagai Rumah Tuhan yang harus mereka jaga dan kuasai dari pihak lain yang tidak mengakui Tuhan mereka. Tak lama setelah Palestina dikuasai oleh Crusader, Palestina diambil alih oleh kerajaan Ottoman yang berasal dari Turki, yang pada saat itu penaklukan dipimpin oleh Rajanya yang bernama Saladin. Kerajaan Ottoman berhasil menduduki Palestina selama hampir 750 tahun yakni dari tahun 1187 – 1918. Dan dibawah kekuasaan Ottomanlah bangsa Arab dengan mayoritas Muslim yang paling dominan menduduki tanah Palestina saat itu.

Namun, pada abad ke 19 bangsa Yahudi kembali menduduki tanah-tanah kosong di Palestina melalui suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Zionisme. Bangsa Yahudi berhasil masuk ke Palestina dengan memanfaatkan kerjasama ekonomi yang saat itu dijalin Ottoman dengan bangsa Eropa. Pendudukan kembali bangsa Yahudi pada saat itu berhasil terhindar dari kecurigaan pemerintahan Ottoman dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak dan untuk melakukan modernisasi populasi

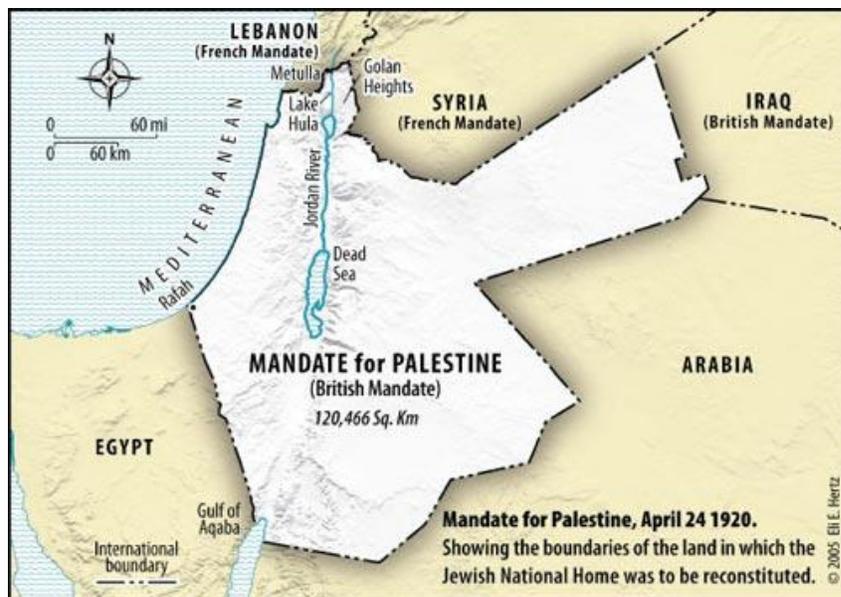
yang terpecah dengan mendirikan pemukiman-pemukiman. Sekitar tahun 1895 – 1914 sebanyak empat puluh ribu orang Yahudi berhasil memasuki Palestina dengan tujuan untuk mendirikan koloni atau pangkalan yang dapat menguasai Palestina sebagai Israel. Tidak seperti pemerintahan pada saat itu, bangsa Arab Palestina gagal untuk diyakinkan oleh bangsa Yahudi. Mereka percaya bahwa kehadiran dan pemukiman bangsa Yahudi akan menjadi ancaman bagi bangsa Arab di Palestina.

Inggris yang saat itu khawatir dengan pernyataan Turki yang akan beraliansi dengan Jerman menjelang Perang Dunia I akhirnya memutuskan untuk membangun kekuatan aliansi bersama Zionis Israel. Melalui kerjasama yang dijalin dengan Zionis Inggris percaya akan mampu membawa Yahudi Amerika untuk mendorong Presiden Woodrow Wilson mengeluarkan keputusan untuk beraliansi dengan Inggris. Pada tanggal 2 November 1917 Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menjanjikan kampung halaman untuk bangsa Yahudi di Palestina, tidak hanya itu Inggris juga menjanjikan kedaulatan Yahudi atas seluruh tanah Palestina maupun negara Palestina. Setelah dikeluarkannya Deklarasi Balfour, Zionis menjadi yakin dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan langkah awal bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai Negara Israel di tanah Palestina.

Inggris berhasil mendapat kemenangannya di Perang Dunia I setelah itu daerah-daerah yang berada pada teritorial Jerman dan Ottoman diberlakukan sistem mandat oleh Liga Bangsa-bangsa yang menentukannya pada saat itu. Sistem mandat yang diberlakukan merupakan sistem yang mengatur bahwa daerah-daerah yang

berada di teritorial Jerman dan Ottoman sementara akan dikuasai oleh negara pemenang perang. Untuk tanah Palestina sistem mandat diberikan kepada Inggris, dan sebagai bentuk penepatan janji Inggris kepada Yahudi maka Inggris menjadikan Palestina sebagai kampung halaman bangsa Yahudi. Dan atas pertimbangan untuk menjalankan ketetapan yang telah diatur didalam Deklarasi Balfour tersebut Inggris menolak permintaan yang diajukan oleh bangsa Arab Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri (Smith, 2001, hal. 81-83).

Gambar III. 1 Peta Alokasi Sistem Mandat di Timur Tengah



Sources: Kuncahyono, T. (2009). *Jalur Gaza Tanh Terjanji, Intifadah, dan Pembersihan Etnis*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Berkat diberlakukannya mandat dari deklarasi Balfour Isarel menjadi semakin leluasa dan gencar dalam upaya mendirikan Negaranya. Jumlah imigrasi Yahudi ke Palestina terus meningkat setiap tahunnya. Dengan dukungan Inggris diaspora

Yahudi semakin meluas, mereka melebarkan wilayah pemukimannya seiring dengan jumlah migrasi yang semakin besar. Hingga pada saat terjadinya Perang Dunia ke-II pengungsi Yahudi Eropa semakin banyak berdatangan ke tanah Palestina yang semakin menambah kerumitan masalah diantara keduanya. Para pengungsi ini merasa khawatir dengan tindakan Nazi yang berniat membinasakan bangsa-bangsa yang dipandang inferior olehnya dengan tujuan untuk dapat mengangkat derajat bangsa Arya sebagai bangsa dengan kedudukan tertinggi (Smith, 2001, hal. 167). Bagi bangsa Arab Palestina kedatangan pengungsi ini secara otomatis akan menambah jumlah pemukiman Yahudi, sehingga konflik diantara keduanya menjadi semakin memanas. Berbagai penolakan atas hal tersebut gencar dilakukan oleh bangsa Arab Palestina yang kemudian memicu adanya pemberontakan-pemberontakan yang ditujukan kepada bangsa Yahudi hingga menyebabkan terjadinya krisis di Palestina. Inggris sebagai pemegang kendali atas sistem mandatnya pun tidak dapat mengendalikan gejolak yang terjadi diantara kedua negara tersebut. Inggris kemudian secara resmi menyerahkan mandat teritorialnya kepada PBB pasca berakhirnya Perang Dunia II.

Untuk menangani krisis yang terjadi di Palestina, PBB mengambil langkah awal dengan membentuk *United Nations Special Committe On Palestine* (UNSCOP) yang bertujuan untuk dapat melakukan investigasi dan menemukan solusi bagi penyelesaian masalah ini. Rencana solusi dengan melakukan pemisahan yakni membagi wilayah Palestina menjadi dua untuk negara Arab dan negara Isarel telah

direkomendasikan oleh UNSCOP. Namun, bangsa Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya secara tegas menolak rekomendasi penyelesaian tersebut. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa dengan mendukung rencana pemisahan tersebut maka Israel dapat dengan mudah mendapatkan legitimasi untuk mendirikan negara Israel di Palestina, merupakan suatu hal yang sangat ditentang oleh bangsa Arab Palestina dan negara-negara tetangga lainnya.

Yahudi yang saat itu merasa telah memiliki kekuatan kemudian mendeklarasikan negara Israel dengan wilayah teritorial yang telah ditentukan oleh UN dalam *Partition Plan* pada tanggal 14 Mei 1948. Kemudian keesokan harinya Amerika Serikat memberikan respon dengan mengakui kemerdekaan Israel secara *de facto* disusul dengan Uni Soviet yang ikut mengakui kemerdekaan Israel secara *de jure*. Dihadari yang sama pula yakni pada tanggal 15 Mei 1948 Israel mendapatkan respon yang berbeda dari negara-negara Arab, pasukan dari negara-negara Arab yang terdiri dari Libanon, Mesir, Syria, Irak, dan Jordania melakukan invasi ke Palestina untuk menyerang Israel yang kemudian menjadi babak baru dimulainya peperangan di Timur Tengah.

Aksi penyerangan yang pertama kali dilakukan kemudian berhasil dihentikan oleh PBB, gencatan senjata pun dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Hal ini juga dikarenakan Mesir dan Syria tidak ingin memperpanjang waktu penyerangan karena Mesir dan Syria merasa yakin dapat memenangkan rencana penyerangan yang selanjutnya akan dilakukan. Namun, tanpa disadari oleh kedua

negara ini bahwa pada saat itu Israel memiliki kesiapan militer yang jauh lebih baik dalam hal struktur komando dan persenjataan (Smith, 2001, hal. 201).

Perang kedua berlangsung sejak tanggal 6 Juli – 19 Juli 1948. Perang kedua berhasil dimenangkan oleh Israel dengan mengalahkan pasukan Arab dan berhasil mengambil alih wilayah Galilea Barat yang masih termasuk dalam wilayah Arab. Kebijakan luar negeri Israel yang ekspansionisme menjadikan gencatan senjata yang diusulkan oleh PBB untuk menghentikan perang tersebut mengalami kegagalan karena Israel telah lebih dulu berhasil memperluas daerah kekuasaannya melebihi dari apa yang telah diatur dalam *Partition Plan*. Hal ini dapat dilihat melalui wilayah Palestina yang saat itu berhasil dikuasainya sebanyak 80% jauh melebihi dari yang ditetapkan PBB sebanyak 56%. Pada bulan Oktober 1948 Israel berhasil melakukan invasi ke daerah Negev dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Israel. Dan ditahun yang sama pula Israel berhasil mengusir pasukan Jordania hingga Laut Merah (Smith, 2001, hal. 201-203). Perang ini berakhir dengan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara Israel, dengan Syria, Mesir, Jordania, dan Libanon dengan dimediasi oleh PBB pada tahun 1949.

Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berjalan, hal tersebut tidak mengarah pada kesepakatan damai antara Israel dengan bangsa Arab. Justru perang diantara kedua pihak terus berlanjut bahkan semakin bergolak. Setidaknya terjadi tiga kali perang yang cukup besar antara Israel dengan negara-negara Arab setelah kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1949 berjalan, yakni perang yang terjadi

ditahun 1956, 1967, dan 1973 (Slater, What Went Wrong ? The Collapse Of The Israeli - Palestinian Peace Process, 2001, hal. 172).

Perang yang terjadi pada tahun 1956 di Terusan Suez antara Israel melawan Mesir. Mesir pada saat itu melarang kapal-kapal yang melalui Terusan Suez menuju Israel. Perlakuan Mesir terhadap kapal-kapal ini dilatarbelakangi karena rasa ketidakpuasaan Mesir atas nasib Palestina dan kegagalan di perang yang sebelumnya, sehingga menjadi alasan yang memicu Mesir melakukan pemblokiran terhadap kapal-kapal tersebut di Terusan Suez. Larangan melanjutkan pelayaran menuju Israel tentu saja memberikan kerugian yang tidak sedikit bagi bangsa Israel, hal ini pun tidak hanya dialami oleh pihak Israel saja namun juga Perancis dan Inggris yang menganggap bahwa Mesir menghalangi jalur perdagangan mereka. Hingga pada akhirnya Israel melakukan invasi ke Terusan Suez untuk mengakhiri penguasaan Mesir di Terusan tersebut dan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan di Mesir saat itu melalui bantuan dari Inggris dan Prancis pada bulan Oktober dan November tahun 1956 (Smith, 2001, hal. 223-224). Kemudian pada bulan Maret 1957 Israel, Inggris, dan Prancis menarik mundur pasukannya dari Terusan Suez atas tekanan dan perintah dari Amerika Serikat.

The Six – Day War merupakan perang kedua yang terjadi pada tahun 1967, perang ini berlangsung selama enam hari dan terjadi di Semenanjung Sinai. Perang enam hari terjadi antara Israel melawan Mesir dan Syria. Israel mengerahkan pasukannya untuk menyerang Syria, hal ini dianggap Israel sebagai bentuk

perlawanan terhadap Syria yang saat itu memberikan dukungan untuk Palestina. Israel merasa cemas dan terancam atas dukungan Syria terhadap infiltrasi yang dilakukan Fatah terhadap Israel. Meskipun Syria telah mendapat bantuan penuh dari tentara Mesir, hal tersebut tidak mampu mengatasi perlawanan yang dilakukan Israel terhadap Syria. Serangan Israel akhirnya mampu membuat mereka berhasil menduduki beberapa wilayah yakni Semenanjung Sinai, Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza, dan Tepi Barat.

Terjadinya Perang Enam Hari ini membuat PBB tidak tinggal diam, untuk menghentikan perang tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 242 yang berisi tentang penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya, serta menghendaki adanya penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara yang berada di wilayah Timur Tengah serta menghormati hak negara-negara tersebut untuk hidup damai (Shlaim, 1994). Namun, Israel tidak mengindahkan resolusi tersebut dan keempat wilayah yang berhasil mereka duduki tetap menjadi jajahan Israel hingga dicapainya kesepakatan Camp David pada tahun 1979 (Slater, *A Palestinian State and Israeli Security*, 1991, hal. 412).

Perang Israel melawan Mesir dan Syria kembali terjadi pada tahun 1973. Kekhawatiran negara-negara Arab akan keberadaan pemukiman Israel yang semakin meningkat dan keinginan untuk membalas kegagalan diperang yang sebelumnya menjadi pemicu yang melatarbelakangi Mesir dan Syria menyerang pemukiman

Israel pada 6 Oktober 1973. Penyerangan yang dilakukan Mesir dan Syria pada saat itu bertepatan dengan hari suci Yahudi yaitu Perayaan Yom Kippur, sehingga dalam sejarahnya perang ini dinamakan dengan Perang Yom Kippur. Namun, kegagalan kembali dialami oleh negara penyerang yaitu Mesir dan Syria. Israel berhasil menambah wilayah kekuasaannya di Terusan Suez (Smith, 2001). Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi No. 338 pada tanggal 22 Oktober 1973, resolusi tersebut berisi tentang pelaksanaan negosiasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perang berdasarkan pada resolusi No. 242 (Shlaim, 1994, hal. 25).

Melalui penyelenggaraan negosiasi *Camp David* sejak tanggal 5 – 7 September 1978 dua kesepakatan antara Israel dan Mesir berhasil diraih. Kesepakatan pertama yakni mengenai penentuan masa depan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otonomi penuh untuk rakyat Palestina dengan berada dibawah pengawasan Jordania dan kesepakatan kedua berisi tentang perjanjian damai Israel dan Mesir serta dikembalikannya Semenanjung Sinai yang sempat dikuasai oleh Israel pada tahun 1967. Akhirnya, pada tahun 1979 kesepakatan tersebut berhasil diraih oleh kedua pihak yaitu Israel dan Mesir. Negara-negara Arab berharap dengan tercapainya kesepakatan tersebut dapat menjadi pertanda baik dan dapat memberikan dampak positif pada kesepakatan-kesepakatan damai lainnya.

Namun, pada kenyataannya kesepakatan yang telah berhasil diraih oleh Mesir dan Israel tidak diikuti dengan membaiknya keadaan para pegungsi Palestina. Hingga saat ini, masih banyak rakyat Palestina yang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan

mengalami banyak pelanggaran HAM. Setelah disepakatinya negosiasi *Camp David* tidak semata-mata menghentikan Israel untuk melancarkan serangan-serangan yang dilakukan terhadap Palestina seperti serangan militer Israel yang disebut sebagai *Operation Cast Lead* pada tanggal 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009 dan *Operation Pillar Of Defense* pada tanggal 14 November 2012 hingga 20 November 2012 yang diakhiri dengan instruksi gencatan senjata dari Mesir kepada Hamad dan Israel.

Salah satu serangan terbesar sepanjang tahun setelah dicapainya kesepakatan *Camp David* yakni serangan yang terjadi pada tahun 2014. Operasi militer yang dilakukan oleh tentara Israel ini disebut sebagai *Operation Protective Edge* sedangkan Hamas memberikan nama gerakan ini sebagai *Intifadhah Al Quds* terjadi selama kurang lebih 51 hari sejak 7 Juli hingga 26 Agustus 2014 (Baruch, 2014, hal. 2).

B. Bentuk-bentuk Permasalahan Anak di Palestina 2014-2016

Gaza City merupakan kota tua yang berada di kawasan timur tengah, lebih tepatnya berada di wilayah konflik Israel dan Palestina. Dapat dikatakan bahwa jalur Gaza merupakan sebuah entitas geografik adtifisial yang selama ini dikelilingi oleh gencatan senjata dan antara tahun 1967 dan 1995 Gaza menjadi subyek pemerintahan militer Israel. Wilayah itulah yang saat ini menjadi tempat tinggal bagi jutaan orang yang diantaranya adalah pengungsi. Perbatasan wilayah yang sering disebut sebagai

“penjara terbesar di dunia” itu dikelilingi oleh tembok pembatas, pos-pos pemeriksaan, dan zona penyangga yang dibangun untuk mencegah orang-orang keturunan Palestina, terutama yang dikategorikan oleh tentara Israel sebagai pelaku bom bunuh diri yang masuk ke dalam wilayah Israel (Kuncahyono, 2009).

Konflik Internasional atau konflik bersenjata merupakan suatu hal yang tidak jarang terjadi dalam tatanan dunia internasional. Setiap anak dalam merespon dampak konflik bersenjata akan berbeda dengan orang dewasa, karena keterbatasan kapasitas dan ketidakmatangan emosional serta fisik mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tengah berkonflik, termasuk memahami alasan politik yang melatarbelakangi konflik tersebut. Bahkan pengalaman merasakan konflik berbeda antara setiap anak, antara anak perempuan dengan anak laki-laki, dan anak sebagai individu maupun sebagai kolektif. Masa anak-anak harusnya mereka lalui dengan penuh keceriaan dimana mereka dapat bermain dan belajar dengan penuh percaya diri dan cinta kasih dari keluarganya. Seolah kita tidak pernah belajar dari kesalahan yang pernah dialami negara lain ketika bangsa di dunia mengklaim diri mereka sebagai bangsa yang beradab padahal perang terus bergolak tak henti-henti di beberapa wilayah. Hal yang sangat menyedihkan dari konflik bersenjata tersebut yakni ketika warga sipil, perempuan, bahkan anak-anak yang tidak mengerti alasan politik dibalik bergolaknya perang harus menjadikan mereka untuk menanggung kesalahan politik dan kesakitan dari dampak yang ditimbulkan akibat perang. Tidak jarang di wilayah konflik anak-anak sering menjadi target untuk direkrut menjadi kombatan perang

selain itu mereka juga sering menjadi target penyerangan militer lawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga anak-anak di wilayah konflik merupakan kelompok yang sangat rentan dalam menghadapi dampak konflik bersenjata.

Perang atau konflik bersenjata yang dianggap sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan sudah seharusnya dihindari. Karena konflik bersenjata merupakan aksi massal yang sudah pasti akan menimbulkan banyak dampak dan kerugian yang harus ditanggung tidak hanya oleh aktor yang berkonflik saja, namun juga mereka yang tidak berdosa khususnya anak-anak. Berikut ini merupakan data jumlah korban anak-anak pada serangan militer sejak 2006-2014.

Tabel III. 1 Data Jumlah Korban Anak Dalam Operasi Militer Israel 2006-2014

No	Operasi Militer	Periode	Jumlah Korban Anak
1	Operation Summer Rains	2006	58 orang
2	Operation Autumns Cliuds	2006	85 orang
3	Operation Warm Winter	2008	33 orang
4	Operation Cast Lead	2008-2009	437 orang
5	Operation Pillar of Defense	2012	305 orang
6	Operation Protective Edge	2014	3374 orang

Anak-anak di Palestina menanggung derita yang tak berkesudahan akibat perang yang dikobarkan oleh rezim Zionis Israel, hal ini dapat kita lihat di beberapa peristiwa penyerangan tentara Israel terhadap Palestina yang menyebabkan tingginya korban anak-anak di wilayah Jalur Gaza. Berdasarkan catatan *Defense For Children International Palestine (DCI)* dalam *Operation Summer Rains* pada bulan Juni – September 2006 telah menyebabkan 58 orang anak meninggal dunia, *Operation*

Autumn Clouds pada November 2006 menyebabkan 85 orang anak meninggal dunia, *Operation Warm Winter* pada Februari – Maret 2008 menyebabkan 33 orang anak meninggal dunia, *Operation Cast Lead* pada Desember 2008 – Januari 2009 menyebabkan sedikitnya 437 orang anak meninggal dunia, *Operation Pillar of Defense* pada November 2012 menyebabkan 305 orang anak meninggal dunia (Palestine, 2014).

Data terakhir *Office for The Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) mencatat dalam *Operation Protective Edge* merupakan serangan yang menyebabkan jumlah korban anak-anak paling tinggi sepanjang tahun. Laporan yang didapat melalui OCHA pada periode 26 Agustus sampai dengan 4 September 2014 menyatakan bahwa 11.100 warga Palestina menjadi korban, diantaranya 3.374 merupakan anak-anak, 2.088 perempuan dan 410 orang tua telah terluka. Dari 3.374 anak diperkirakan hingga 1.000 anak-anak yang terluka akan memiliki cacat permanen dan sekitar 1.500 anak-anak yatim dan/atau piatu akan membutuhkan dukungan terus-menerus dari sektor perlindungan dan kesejahteraan anak (OCHA with humanitarian partners, 2014, hal. 1-2).

Gejolak perang yang terjadi selama 51 hari sejak 7 Juli – 26 Agustus 2014 tidak hanya menyebabkan warga sipil menjadi korban namun juga menyebabkan berbagai kerusakan pada bangunan-bangunan yang ada di Palestina, tercatat ada 22 sekolah yang telah hancur total dan 118 sekolah mengalami rusak berat, sekitar 18.000 unit rumah atau 5% saham perumahan di Gaza hancur akibat serangan militer

dan sekitar 108.000 orang tidak memiliki tempat tinggal. Akibat kerusakan ribuan unit rumah ini diperkirakan 485.000 orang atau sekitar 20% warga sipil Gaza yang mengungsi. *United Nations Relief and Works Agency For Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) ditunjuk untuk membantu menangani posko penampungan darurat yang menampung sekitar 290.000 orang di penampungan sekolah dan 15.000 orang berada di penampungan informal seperti bangunan kosong, gereja, dan masjid. Sekitar 60.812 orang terdaftar sebagai pengungsi di salah satu lokasi penampungan yang didirikan oleh UNRWA yakni Shelter 31. Jumlah pengungsi tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan jumlah pengungsi pada serangan Operasi *Cast Lead* Desember 2008 - Januari 2009 (OCHA with humanitarian partners, 2014, hal. 3).

Dikarenakan meningkatnya jumlah pengungsi yang ada di penampungan UNRWA pemerintah Palestina kemudian berusaha untuk menambah lokasi penampungan dengan menggunakan beberapa rumah yang masih dapat dihuni dan menjadikan bangunan pemerintah seperti dua sekolah yang dialihkan menjadi lokasi penampungan sementara. Terdapat 50.000 orang yang diperkirakan tinggal dengan keluarga angkat dan 700 orang berlindung di dua sekolah pemerintah (OCHA with humanitarian partners, 2014, hal. 3).

Tidak hanya dalam kondisi konflik memanas yang menyebabkan korban jiwa, tentara Israel juga melancarkan serangan bertubi-tubi pada hari-hari biasa. Dan data pada tahun 2015 yaitu pada bulan Juli sampai September 2015 sebanyak 165 orang anak mengalami luka tembak (OCHA with humanitarian partners, 2014). Pada tiga

bulan terakhir tahun 2015 sebanyak 25 orang anak meninggal dunia akibat tertembak dalam serangan militer Israel, dimana 23 anak (19 anak laki-laki dan 4 anak perempuan) meninggal akibat tembakan yang diluncurkan oleh tentara Israel di kawasan Jerusalem dan Tepi Barat sementara 2 orang lainnya ditembak mati oleh tentara Israel di kawasan Jalur Gaza, dan sebanyak 1.310 anak mengalami luka tembak yang cukup serius (Bannoura, 2016).

Selain menjadi korban dalam serangan militer Israel selama memanasnya konflik, anak-anak juga menjadi korban pelanggaran HAM dalam penangkapan dan penahanan oleh tentara Israel tanpa alasan yang jelas. *United Nations International Children's Fund* (UNICEF) juga melaporkan terdapat sejumlah anak Palestina yang menjadi tahanan Zionis Israel pada bulan September 2014 yaitu sebanyak 182 anak (57 orang anak laki-laki dan 125 orang anak perempuan) berusia 14 sampai 17 tahun menjadi tahanan atas dugaan ancaman keamanan. Pada bulan Desember 2015 sebanyak 422 anak yang berusia sekitar 12 sampai 17 tahun menjadi tahanan Zionis Israel. Jumlah anak Palestina yang menjadi tahanan Zionis Israel selalu meningkat sebanyak 219 anak setiap bulannya sekitar 15% pada tahun 2015 (UNICEF report confirms ill-treatment of Palestinian child detainees remains systematic, 2015). Pusat Studi Tawanan Palestina juga mengumumkan bahwa penjajah Zionis menyebut anak-anak Palestina yang ditawan sebagai perusak dan teroris. Militer Israel menyiksa anak-anak dan juga menekan mereka agar bersedia menjadi mata-mata Zionis.

Pada tahun 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014, terkumpul sebanyak 208 kesaksian yang melaporkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh *Israel Defence Force (IDF)*, *Israel Prison Service (IPS)*, dan *Israel Security Agency (ISA)* terhadap anak-anak Palestina selama berada dibawah tahanan militer Israel dan selama berada dalam proses pemindahan tahanan. Berdasarkan data yang didapat melalui *Global Child Protection* bahwa dari 208 kesaksian tersebut terdapat 139 orang anak yang berusia 16 - 17 tahun dan 69 anak berusia dibawah 16 tahun yang telah melaporkan pelanggaran tersebut (UNICEF, 2015). Berbagai bentuk pelanggaran yang dialami oleh anak-anak Palestina ini yakni diantaranya:

- a) Seratus enam puluh dua (162) anak dilaporkan sedang ditutup matanya dan ditarik secara paksa selama proses pemindahan tempat tahanan.
- b) Seratus delapan puluh sembilan (189) anak dilaporkan terluka dipergelangan tangan akibat diikat.
- c) Seratus tujuh puluh satu (171) anak dilaporkan menjadi sasaran kekerasan fisik selama penangkapan, interogasi dan/atau penahanan.
- d) Seratus empat puluh empat (144) anak dilaporkan mengalami pelecehan verbal dan intimidasi selama penangkapan, interogasi dan/atau penahanan.
- e) Delapan puluh sembilan (89) anak dipindahkan ke tempat tahanan bawah tanah.

- f) Tujuh puluh sembilan (79) anak dilaporkan ditangkap di malam hari dan 45 anak ditangkap selama bentrokan atau demonstrasi.
- g) Seratus enam puluh tiga (163) anak dilaporkan selama penangkapan tidak diberitahu tentang hak-hak hukum, khususnya hak untuk mendapatkan pembelaan dan hak untuk tetap diam.
- h) Dua ratus dua puluh empat (224) anak dilaporkan mengalami penggeledahan hingga ditelanjangi di markas militer Israel.
- i) Dua puluh delapan (28) anak dilaporkan menjalani kurungan tersendiri di Al Jalame dan Petah Serikat (situs penahanan di dalam Israel) dan berada di bawah interogasi ISA.
- j) Enam tiga (63) anak dilaporkan mengalami pemaksaan untuk menandatangani dokumen pengakuan dalam bahasa Ibrani selama proses interogasi.

Tidak sebatas diarena perang kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap anak-anak di Palestina, namun juga di beberapa sekolah yang mereka harapkan dapat menjadi salah satu tempat yang aman bagi mereka menuntut ilmu justru kerap melakukan kekerasan terhadap beberapa siswanya. Berdasarkan laporan dari Departemen Pendidikan Palestina tahun 2014 sebanyak 76.5% siswa sekolah dasar dan 81.9% siswa sekolah menengah di Palestina mengalami kekerasan di sekolah (Growing Up Between Israeli Settlements and Soldiers, 2014). Selain itu hasil survei yang dilakukan Biro Pusat Statistik Palestina menemukan bahwa 91.5%

dari anak-anak Palestina yang berusia satu sampai empat belas tahun telah mendapat hukuman fisik disekolahnya (Ramallah students say "I am here to learn, not to be hit!", 2016).

Gambar III. 2 checkpoint dalam jarak perjalanan dari rumah menuju sekolah



Sources: Report Of Defense For Children International Palestina 204; Growing Up Between Israeli Settlements and Soldiers

Salah satu serangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap sekolah di Palestina yakni pada tanggal 12 Januari 2014 ketika seluruh siswa sedang melaksanakan ujian akhir, tentara Israel melemparkan granat melalui jendela-jendela sekolah yang menyebabkan gas air mata menyebar di beberapa kelas (Palestine, 2014). Hal ini membuat mereka harus menanggung kesakitan akibat teror yang tidak

hanya datang dari para tentara yang menyerang sekolah mereka namun juga dari pihak sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Sepanjang perjalanan sebelum sampai di sekolah maupun menuju pulang kembali ke rumah mereka, anak-anak harus lebih dulu melalui beberapa *checkpoints* yang dijaga ketat oleh tentara Israel. Sehingga mereka selalu dalam ketakutan ketika berada di jalan bahkan dalam keadaan menangis histeris ketika sampai di rumah maupun di sekolah.

Konflik bersenjata memberikan dampak yang begitu besar bagi anak-anak, seperti kekerasan yang berbasis gender, perekrutan menjadi tentara perang, penahanan ilegal, berpisah dari keluarga, dan menjadi korban perdagangan manusia. Disamping itu banyak anak-anak yang mengalami gangguan psikologi karena menyaksikan penembakan anggota keluarga mereka serta penggeledahan dan pendudukan paksa oleh tentara Israel, sehingga anak-anak mengalami insomnia, depresi, stress, dan trauma yang berkepanjangan dalam hidup mereka.

Bagi anak-anak yang tinggal di daerah sekitar perbatasan, mendengar suara-teriakan orang yang sekarat atau teriakan berkepanjangan akibat kesakitan serta suara-suara rentetan tembakan, bom, dan sejenisnya tentu saja bukanlah harapan mereka. Meskipun anak-anak tersebut banyak disembunyikan di dalam bunker oleh orang tua mereka dengan tujuan perlindungan dan keselamatan, namun efek suara yang terjadi di luar bunker masih dapat terjelas dari dalam bunker tempat mereka bersembunyi. Jika di luar bunker terlalu banyak orang-orang yang sekarat, maka akan dibawa masuk ke bunker tersebut untuk mendapatkan perawatan. Dari sinilah anak-

anak dapat melihat dengan mata kepala sendiri tentang mereka yang sekarat, yang kakinya terluka, patah, bahkan hancur akibat terkena bom dan sejenisnya. Suatu kejadian pada tanggal 27 Desember 2008 seorang anak berusia delapan tahun secara tidak sengaja melalui jendela dari dalam rumah menyaksikan kematian ibunya akibat terkena lemparan bom fosfor dari udara yang saat itu dilakukan oleh militer Israel (Santoso B. , 2011, hal. 19-25).

Hidup berselimut kecemasan akan kematian yang mungkin segera menemui mereka dan pemandangan menyakitkan yang nyata di hadapan mereka bukanlah harapan anak-anak Palestina. Banyak diantara anak-anak yang berada di dalam bunker tersebut yang mengalami trauma dalam hidup yang luar biasa. Mereka akan sangat takut dan histeris ketika mendengar ada keributan, terlebih ketika mereka melihat pasukan tentara. Trauma berkepanjangan benar-benar mereka alami, terlalu banyak anak-anak di wilayah perang ketika ditanyai soal nama dan umur oleh sejumlah relawan mereka justru selalu memberikan jawaban yang tidak sesuai “keluargaku semua mati” hanya itu yang terucap dari bibir mereka. Banyak pula yang hanya diam dengan sorot mata yang kosong menggantung (Kuncahyono, 2009, hal. 220). Tentu saja ingatan mereka akan apa yang mereka lihat secara langsung di wilayah konflik tidak akan begitu saja hilang dengan mudahnya. Meskipun sesungguhnya itu merupakan hal yang sangat ingin mereka lupakan karena hal tersebut ialah mimpi buruk terbesar bagi anak-anak.